



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

# LAPORAN REALISASI KEUANGAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS

  
KASI, INFORMATIKA  
AN PERSANDIAN  
SI BANTEN

2023

## KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten merupakan penjabaran dari hasil pelaksanaan anggaran pada masing-masing kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten periode Tahun Anggaran 2023 sebagai laporan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, guna memberikan gambaran tentang capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja sesuai dengan tolok ukur dan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sampai dengan Semester I (Triwulan II) Tahun Anggaran 2023.

Semoga laporan yang kami sajikan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah pada Semester I Tahun Anggaran 2023 serta sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
PROVINSI BANTEN,



NANA SURYANA, ST, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710624 199803 1 006

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Triwulan II (Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
PROVINSI BANTEN,



NANA SURYANA, ST, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710624 199803 1 006

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
<b>BAB II INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....</b>	<b>8</b>
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten .....	8
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	14
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....</b>	<b>15</b>
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah..	15
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.....	15
<b>BAB V PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOISIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA.....</b>	<b>17</b>
5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	17
5.1.1. Belanja Operasi.....	17
5.1.2. Belanja Modal.....	17
5.2. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis.....	18
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Memperhatikan Pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten selama satu periode pelaporan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten adalah dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Governance).

**1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi  
Pemerintah Provinsi Banten

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini terbagi atas 6 bagian yaitu terdiri dari :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bagian ini membahas tentang maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Bagian ini membahas kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD**

Bagian ini membahas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Bagian ini berisi entitas akuntansi, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD.

#### **Bab V Penjelasan atas Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis**

Bagian ini berisi rincian dan penjelasan secara umum tentang laporan dimaksud beserta alasan-alasan terdapatnya perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran.

#### **Bab VI Penutup**

**BAB II****INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Indikator Pencapaian Target Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. terikat pada tujuan, sasaran program dan menggambarkan capaian hasil;
2. harus dibatasi pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan;
3. diutamakan pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas;
4. dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan hasil dari kegiatan.

Adapun jenis-jenis indikator kinerja yaitu :

1. Indikator masukan (input);
2. Indikator keluaran (output);
3. Indikator hasil (out come);
4. Indikator manfaat (benefit);
5. Indikator dampak (impact).

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.68.806.000.000,00 dimaksud untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Langsung terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari ke 5 program dimaksud, yaitu :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

**3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

**4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

**5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

- a. Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

## BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatik, Statistika dan Persandian Provinsi Banten**

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten melaksanakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan. Adapun Pagu Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten untuk melaksanakan 13 kegiatan dimaksud sebesar Rp.68.806.000.000,00.

Berikut diuraikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berdasarkan pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp.500.000.000,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 157.877.900,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 31,58%;
2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp.14.226.804.642,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.297.132.657,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 37,23%;
3. *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp. 16.000.000,00 realisasi belanja sampai dengan Semester I

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.0,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 0,00%;

4. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp. 357.434.400 realisasi belanja sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.191.795.600,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 53.66%;
5. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp. 763.427.680,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.410.499.800,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 53,77%;
6. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, rencana biaya sebesar Rp.2.989.540.369,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 795.679,000,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 26,62%;
7. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, rencana biaya sebesar Rp. 3.902.324.520,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.673.320.781,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 42,88%;
8. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, rencana biaya sebesar Rp.1.048.118.900,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 133.515.200,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 12,74%;
9. *Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp.12.686.573.000,00 realisasi belanja sampai

dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.589.767.200,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 44,06%;

10. *Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp.14.917.011.639,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.643.190.164,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 31,13%;
11. *Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp.13.592.943.750,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.073.694.568,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 29,97%;
12. *Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp.1.055.542.600,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 277.462.200,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 26,29%;
13. *Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp. 2.750.278.500,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 255.212.919,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 9.28%;

Berdasarkan uraian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan, capaian kinerja keuangan dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten**

Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(Rp)	%
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>500.000.000</b>	<b>157.877.900</b>	<b>31,58%</b>	<b>342.122.100</b>	<b>68,42%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	293.508.000	103.766.200	35,35%	189.741.800	64,65%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.800.000	-	0,00%	15.800.000	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.800.000	-	0,00%	15.800.000	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.800.000	-	0,00%	10.800.000	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.800.000	-	0,00%	10.800.000	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.153.000	46.978.900	45,11%	57.174.100	54,89%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.139.000	7.132.800	14,52%	42.006.200	85,48%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.226.804.642</b>	<b>5.297.132.657</b>	<b>37,23%</b>	<b>8.929.671.771</b>	<b>62,77%</b>
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.796.314.642	5.174.705.457	37,51%	8.621.608.971	62,49%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.490.000	98.942.500	27,30%	263.547.500	72,70%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.686.100	18.369.300	43,03%	24.316.800	56,97%
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.106.100	1.923.400	27,07%	5.182.700	72,93%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.725.100	-	0,00%	3.725.100	100,00%
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.771.200	-	0,00%	3.771.200	100,00%
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.370.500	3.192.000	38,13%	5.178.500	61,87%
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.341.000	-	0,00%	2.341.000	100,00%
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>16.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,00%</b>
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	0,00%	5.000.000	100,00%
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	0,00%	5.000.000	100,00%
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	-	0,00%	6.000.000	100,00%
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>357.434.400</b>	<b>191.795.600</b>	<b>53,66%</b>	<b>165.638.800</b>	<b>46,34%</b>
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136.434.400	135.618.700	99,40%	815.700	0,60%
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	1.440.000	24,00%	4.560.000	76,00%
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	680.000	13,60%	4.320.000	86,40%
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	9.056.900	30,19%	20.943.100	69,81%
23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000	45.000.000	25,00%	135.000.000	75,00%
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>763.427.680</b>	<b>410.499.800</b>	<b>53,77%</b>	<b>352.927.880</b>	<b>46,23%</b>

Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.274.400	40.271.000	97,57%	1.003.400	2,43%
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.861.600	177.820.500	89,42%	21.041.100	10,58%
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	58.315.000	97,19%	1.685.000	2,81%
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.000.000	90.666.300	41,21%	129.333.700	58,79%
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.000.000	39.095.000	53,55%	33.905.000	46,45%
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.291.680	4.332.000	2,96%	141.959.680	97,04%
30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	-	0,00%	12.000.000	100,00%
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	-	0,00%	12.000.000	100,00%
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.989.540.369</b>	<b>795.679.000</b>	<b>26,62%</b>	<b>2.193.861.369</b>	<b>73,38%</b>
32	Pengadaan Mebel	234.311.600	-	0,00%	234.311.600	100,00%
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.144.182.069	-	0,00%	1.144.182.069	100,00%
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.611.046.700	795.679.000	49,39%	815.367.700	50,61%
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.902.324.520</b>	<b>1.673.320.781</b>	<b>42,88%</b>	<b>2.229.003.739</b>	<b>57,12%</b>
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.086.264.000	294.438.895	27,11%	791.825.105	72,89%
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.816.060.520	1.378.881.886	48,96%	1.437.178.634	51,04%
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.048.118.900</b>	<b>133.515.200</b>	<b>12,74%</b>	<b>914.603.700</b>	<b>87,26%</b>
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	8.184.000	19,96%	32.816.000	80,04%
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	486.820.000	102.946.200	21,15%	383.873.800	78,85%
39	Pemeliharaan Mebel	6.458.900	-	0,00%	6.458.900	100,00%
40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.040.000	14.810.000	8,09%	168.230.000	91,91%
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	-	0,00%	250.000.000	100,00%
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.800.000	7.575.000	9,38%	73.225.000	90,63%
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>12.686.573.000</b>	<b>5.589.767.200</b>	<b>44,06%</b>	<b>7.096.805.800</b>	<b>55,94%</b>
43	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	384.325.000	74.696.000	19,44%	309.629.000	80,56%
44	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	661.600.000	270.011.500	40,81%	391.588.500	59,19%
45	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.409.154.000	163.455.600	4,79%	3.245.698.400	95,21%
46	Pelayanan Informasi Publik	442.154.000	122.900.750	27,80%	319.253.250	72,20%
47	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3.830.010.000	3.465.033.250	90,47%	364.976.750	9,53%
48	Manajemen Komunikasi Krisis	154.950.000	37.037.100	23,90%	117.912.900	76,10%
49	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	82.150.000	28.977.000	35,27%	53.173.000	64,73%

Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
50	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	3.647.000.000	1.404.973.000	38,52%	2.242.027.000	61,48%
51	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	75.230.000	22.683.000	30,15%	52.547.000	69,85%
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>14.917.011.639</b>	<b>4.643.190.164</b>	<b>31,13%</b>	<b>10.273.821.475</b>	<b>68,87%</b>
52	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	30.000.000	1.389.650	4,63%	28.610.350	95,37%
53	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.000.000	9.242.750	30,81%	20.757.250	69,19%
54	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	14.857.011.639	4.632.557.764	31,18%	10.224.453.875	68,82%
<b>11</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>13.592.943.750</b>	<b>4.073.694.568</b>	<b>29,97%</b>	<b>9.519.249.182</b>	<b>70,03%</b>
55	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	207.464.100	56.910.500	27,43%	150.553.600	72,57%
56	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	30.000.000	9.626.250	32,09%	20.373.750	67,91%
57	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.605.677.900	771.238.250	48,03%	834.439.650	51,97%
58	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	7.013.250.000	2.344.200.118	33,43%	4.669.049.882	66,57%
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	30.000.000	12.467.000	41,56%	17.533.000	58,44%
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2.339.773.750	339.652.000	14,52%	2.000.121.750	85,48%
61	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	920.428.000	387.462.500	42,10%	532.965.500	57,90%
62	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	392.230.000	62.255.750	15,87%	329.974.250	84,13%
63	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	500.000.000	78.310.500	15,66%	421.689.500	84,34%
64	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	104.260.000	-	0,00%	104.260.000	100,00%
65	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	449.860.000	11.571.700	2,57%	438.288.300	97,43%
<b>12</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>1.055.542.600</b>	<b>277.462.200</b>	<b>26,29%</b>	<b>778.080.400</b>	<b>73,71%</b>
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	767.016.500	250.405.200	32,65%	516.611.300	67,35%
67	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50.010.000	14.640.000	29,27%	35.370.000	70,73%
68	Membangun Metadata Statistik Sektor	25.574.000	-	0,00%	25.574.000	100,00%
69	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor	89.998.000	1.790.000	1,99%	88.208.000	98,01%
70	Pengembangan Infrastruktur	63.056.100	-	0,00%	63.056.100	100,00%

Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)
71	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	59.888.000	10.627.000	17,74%	49.261.000	82,26%
<b>13</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>2.750.278.500</b>	<b>255.212.919</b>	<b>9,28%</b>	<b>2.495.065.581</b>	<b>90,72%</b>
72	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	99.820.000	1.276.000	1,28%	98.544.000	98,72%
73	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.609.682.500	240.555.919	9,22%	2.369.126.581	90,78%
74	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	40.776.000	13.381.000	32,82%	27.395.000	67,18%
<b>JUMLAH</b>		<b>68.806.000.000</b>	<b>23.499.147.989</b>	<b>34,15%</b>	<b>45.306.852.011</b>	<b>65,85%</b>

**Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023**

### **3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Dalam pencapaian target kinerja Triwulan II ( Semester I ) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

1. Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
2. - Adanya ketidaksesuaian antara kegiatan dengan uraian tugas  
- Penerbitan Keputusan Gubernur Tentang Pengelola Keuangan, dan lain lain  
- Adanya Perubahan Jadwal Oleh Penyelenggara Kegiatan ( Pusat )  
- Waktu mulai efektif pelaksanaan kegiatan kurang lebih pertengahan Februari 2023

**BAB IV****KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan Keuangan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Provinsi yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.68.806.000.000,00 untuk melaksanakan 5 Program yang terbagi dalam 13 kegiatan. Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan Sistem Akuntansi Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan 2023) dari Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT)

**4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

**Entitas Akuntansi** adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan SKPKD, dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten.

**Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Provinsi Banten yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah,

serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan oleh kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

## BAB V

**PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN  
PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA****5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Realisasi Anggaran**

Secara garis besar belanja daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja untuk gaji pegawai dan tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang membiayai program dan kegiatan di lingkungan OPD. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten mengalokasikan belanja yang terdiri atas :

**5.1.1. Belanja Operasi**

Pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 alokasi Belanja Operasi untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebesar **Rp.52.001.454.382,00**. Pada akhir Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 ( 30 Juni 2023) Realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp. 19.628.831.909,00** atau sebesar **37,75%**.

**5.1.2. Belanja Modal**

Belanja Modal yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 16.804.545.618,00** yang digunakan untuk membiayai kegiatan, dalam bentuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan software dan biaya pendukung lainnya. Pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2023 (30 Juni 2023) Realisasi Belanja Modal masih sebesar **Rp.3.870.316.080,00** atau sebesar **23.03%**.

Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama  
Per Rekening Jenis

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran s/d Semester I	Prognosis	%
<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>52.001.454.382,00</b>	<b>19.628.831.909,00</b>	<b>32.372.622.473,00</b>	<b>32.372.622.473,00</b>	<b>37,75</b>
Belanja Pegawai	14.158.804.642,00	5.273.647.957,00	8.885.156.685,00	8.885.156.685,00	37,25
Belanja Barang dan Jasa	34.342.649.740,00	11.005.183.952,00	23.337.465.788,00	23.337.465.788,00	32,05
Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.350.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	95,71
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16.804.545.618,00</b>	<b>3.870.316.080,00</b>	<b>12.934.229.538,00</b>	<b>12.934.229.538,00</b>	<b>23,03</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.019.641.068,00	2.939.371.080,00	9.080.269.988,00	9.080.269.988,00	24,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.180.000.000,00	795.679.000,00	384.321.000,00	384.321.000,00	67,43
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.126.400,00	0,00	440.126.400,00	440.126.400,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.164.778.150,00	135.266.000,00	3.029.512.150,00	3.029.512.150,00	4,27
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>68.806.000.000,00</b>	<b>23.499.147.989,00</b>	<b>45.306.852.011,00</b>	<b>45.306.852.011,00</b>	<b>34,15</b>

**5.2. Penjelasan Atas Laporan Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya**

Realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten Provinsi Banten pada periode Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 23.499.147.989,00** atau **34.15%** dari pagu anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten **Prognosis Belanja dicatat berdasarkan sisa anggaran setelah dikurangkan :**

- a. Sisa kontrak atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah direalisasikan sampai dengan semester pertama;
- b. Kegiatan atau anggaran yang direncanakan dilakukan/diserap pada semester pertama maupun semester kedua tetapi dengan alasan-alasan tertentu, tidak jadi atau tidak akan dilaksanakan/diserap.

Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten Provinsi Banten, Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis per kegiatan, diuraikan sebagai berikut :

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp.500.000.000,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 157.877.900,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 342.122.100,00;
2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp.14.226.804.642,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.297.132.657,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 8.929.671.985,00;
3. *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp. 16.000.000,00 realisasi belanja sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.0,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp.16.000.000,00;
4. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp. 357.434.400 realisasi belanja sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 191.795.600,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp.165.638.800,00;
5. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*, rencana biaya sebesar Rp. 763.427.680,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 410.499.800,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 352.927.880,00;
6. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, rencana biaya sebesar Rp.2.989.540.369,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 795.679.000,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 2.193.861.369,00;

7. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, rencana biaya sebesar Rp. 3.902.324.520,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.673.320.781,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 2.229.003.739,00;
8. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, rencana biaya sebesar Rp.1.048.118.900,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 133.515.200,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 914.603.700,00;
9. *Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp.12.686.573.000,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.589.767.200,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 7.096.805.800,00;
10. *Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp.14.917.011.639,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.643.190.164,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 10.273.821.475,00;
11. *Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp.13.592.943.750,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.073.694.568,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 9.519.249.182,00;

12. *Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar Rp.1.055.542.600,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 277.462.200,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 778.080.400,00;

13. *Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*, rencana biaya sebesar sebesar Rp. 2.750.278.500,00 realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 255.212.919,00 dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 2.495.065.581,00;

Berdasarkan uraian Realisasi Anggaran dan Prognosis keuangan dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Prognosis Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten**

Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran		Prognosis (Rp)
		(Rp)	%	(Rp)	%	
<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>500.000.000</b>	<b>157.877.900</b>	<b>31,58%</b>	<b>342.122.100</b>	<b>68,42%</b>	<b>342.122.100</b>
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	293.508.000	103.766.200	35,35%	189.741.800	64,65%	189.741.800
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.800.000	-	0,00%	15.800.000	100,00%	15.800.000
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15.800.000	-	0,00%	15.800.000	100,00%	15.800.000
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.800.000	-	0,00%	10.800.000	100,00%	10.800.000
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.800.000	-	0,00%	10.800.000	100,00%	10.800.000
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.153.000	46.978.900	45,11%	57.174.100	54,89%	57.174.100
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.139.000	7.132.800	14,52%	42.006.200	85,48%	42.006.200
<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.226.804.642</b>	<b>5.297.132.871</b>	<b>37,23%</b>	<b>8.929.671.771</b>	<b>62,77%</b>	<b>8.929.671.771</b>
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.796.314.642	5.174.705.671	37,51%	8.621.608.971	62,49%	8.621.608.971
9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.490.000	98.942.500	27,30%	263.547.500	72,70%	263.547.500

Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Prognosis
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.686.100	18.369.300	43,03%	24.316.800	56,97%	24.316.800
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.106.100	1.923.400	27,07%	5.182.700	72,93%	5.182.700
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.725.100	-	0,00%	3.725.100	100,00%	3.725.100
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.771.200	-	0,00%	3.771.200	100,00%	3.771.200
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.370.500	3.192.000	38,13%	5.178.500	61,87%	5.178.500
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.341.000	-	0,00%	2.341.000	100,00%	2.341.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>16.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000.000</b>
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	0,00%	5.000.000	100,00%	5.000.000
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	0,00%	5.000.000	100,00%	5.000.000
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	-	0,00%	6.000.000	100,00%	6.000.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>357.434.400</b>	<b>191.795.600</b>	<b>53,66%</b>	<b>165.638.800</b>	<b>46,34%</b>	<b>165.638.800</b>
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136.434.400	135.618.700	99,40%	815.700	0,60%	815.700
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	1.440.000	24,00%	4.560.000	76,00%	4.560.000
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	680.000	13,60%	4.320.000	86,40%	4.320.000
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	9.056.900	30,19%	20.943.100	69,81%	20.943.100
23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000	45.000.000	25,00%	135.000.000	75,00%	135.000.000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>763.427.680</b>	<b>410.499.800</b>	<b>53,77%</b>	<b>352.927.880</b>	<b>46,23%</b>	<b>352.927.880</b>
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.274.400	40.271.000	97,57%	1.003.400	2,43%	1.003.400
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.861.600	177.820.500	89,42%	21.041.100	10,58%	21.041.100
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	58.315.000	97,19%	1.685.000	2,81%	1.685.000
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.000.000	90.666.300	41,21%	129.333.700	58,79%	129.333.700
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.000.000	39.095.000	53,55%	33.905.000	46,45%	33.905.000
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.291.680	4.332.000	2,96%	141.959.680	97,04%	141.959.680
30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	-	0,00%	12.000.000	100,00%	12.000.000
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	-	0,00%	12.000.000	100,00%	12.000.000

Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Prognosis	
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.989.540.369</b>	<b>795.679.000</b>	<b>26,62%</b>	<b>2.193.861.369</b>	<b>73,38%</b>	<b>2.193.861.369</b>
32	Pengadaan Mebel	234.311.600	-	0,00%	234.311.600	100,00%	234.311.600
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.144.182.069	-	0,00%	1.144.182.069	100,00%	1.144.182.069
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.611.046.700	795.679.000	49,39%	815.367.700	50,61%	815.367.700
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.902.324.520</b>	<b>1.673.320.781</b>	<b>42,88%</b>	<b>2.229.003.739</b>	<b>57,12%</b>	<b>2.229.003.739</b>
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.086.264.000	294.438.895	27,11%	791.825.105	72,89%	791.825.105
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.816.060.520	1.378.881.886	48,96%	1.437.178.634	51,04%	1.437.178.634
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.048.118.900</b>	<b>133.515.200</b>	<b>12,74%</b>	<b>914.603.700</b>	<b>87,26%</b>	<b>914.603.700</b>
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	8.184.000	19,96%	32.816.000	80,04%	32.816.000
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	486.820.000	102.946.200	21,15%	383.873.800	78,85%	383.873.800
39	Pemeliharaan Mebel	6.458.900	-	0,00%	6.458.900	100,00%	6.458.900
40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.040.000	14.810.000	8,09%	168.230.000	91,91%	168.230.000
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	-	0,00%	250.000.000	100,00%	250.000.000
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.800.000	7.575.000	9,38%	73.225.000	90,63%	73.225.000
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>12.686.573.000</b>	<b>5.589.767.200</b>	<b>44,06%</b>	<b>7.096.805.800</b>	<b>55,94%</b>	<b>7.096.805.800</b>
43	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	384.325.000	74.696.000	19,44%	309.629.000	80,56%	309.629.000
44	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	661.600.000	270.011.500	40,81%	391.588.500	59,19%	391.588.500
45	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.409.154.000	163.455.600	4,79%	3.245.698.400	95,21%	3.245.698.400
46	Pelayanan Informasi Publik	442.154.000	122.900.750	27,80%	319.253.250	72,20%	319.253.250
47	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3.830.010.000	3.465.033.250	90,47%	364.976.750	9,53%	364.976.750
48	Manajemen Komunikasi Krisis	154.950.000	37.037.100	23,90%	117.912.900	76,10%	117.912.900
49	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	82.150.000	28.977.000	35,27%	53.173.000	64,73%	53.173.000
50	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	3.647.000.000	1.404.973.000	38,52%	2.242.027.000	61,48%	2.242.027.000
51	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	75.230.000	22.683.000	30,15%	52.547.000	69,85%	52.547.000
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>14.917.011.639</b>	<b>4.643.190.164</b>	<b>31,13%</b>	<b>10.273.821.475</b>	<b>68,87%</b>	<b>10.273.821.475</b>

Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Prognosis
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
52	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	30.000.000	1.389.650	4,63%	28.610.350	95,37%	28.610.350
53	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.000.000	9.242.750	30,81%	20.757.250	69,19%	20.757.250
54	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	14.857.011.639	4.632.557.764	31,18%	10.224.453.875	68,82%	10.224.453.875
<b>11</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>13.592.943.750</b>	<b>4.073.694.568</b>	<b>29,97%</b>	<b>9.519.249.182</b>	<b>70,03%</b>	<b>9.519.249.182</b>
55	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	207.464.100	56.910.500	27,43%	150.553.600	72,57%	150.553.600
56	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	30.000.000	9.626.250	32,09%	20.373.750	67,91%	20.373.750
57	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.605.677.900	771.238.250	48,03%	834.439.650	51,97%	834.439.650
58	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	7.013.250.000	2.344.200.118	33,43%	4.669.049.882	66,57%	4.669.049.882
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	30.000.000	12.467.000	41,56%	17.533.000	58,44%	17.533.000
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2.339.773.750	339.652.000	14,52%	2.000.121.750	85,48%	2.000.121.750
61	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	920.428.000	387.462.500	42,10%	532.965.500	57,90%	532.965.500
62	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	392.230.000	62.255.750	15,87%	329.974.250	84,13%	329.974.250
63	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	500.000.000	78.310.500	15,66%	421.689.500	84,34%	421.689.500
64	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	104.260.000	-	0,00%	104.260.000	100,00%	104.260.000
65	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	449.860.000	11.571.700	2,57%	438.288.300	97,43%	438.288.300
<b>12</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>1.055.542.600</b>	<b>277.462.200</b>	<b>26,29%</b>	<b>778.080.400</b>	<b>73,71%</b>	<b>778.080.400</b>
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	767.016.500	250.405.200	32,65%	516.611.300	67,35%	516.611.300
67	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50.010.000	14.640.000	29,27%	35.370.000	70,73%	35.370.000
68	Membangun Metadata Statistik Sektoral	25.574.000	-	0,00%	25.574.000	100,00%	25.574.000
69	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	89.998.000	1.790.000	1,99%	88.208.000	98,01%	88.208.000
70	Pengembangan Infrastruktur	63.056.100	-	0,00%	63.056.100	100,00%	63.056.100
71	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	59.888.000	10.627.000	17,74%	49.261.000	82,26%	49.261.000

Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Prognosis
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)		(Rp)
<b>13</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>2.750.278.500</b>	<b>255.212.919</b>	<b>9,28%</b>	<b>2.495.065.581</b>	<b>90,72%</b>	<b>2.495.065.581</b>
72	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	99.820.000	1.276.000	1,28%	98.544.000	98,72%	98.544.000
73	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.609.682.500	240.555.919	9,22%	2.369.126.581	90,78%	2.369.126.581
74	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	40.776.000	13.381.000	32,82%	27.395.000	67,18%	27.395.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>68.806.000.000</b>	<b>23.499.147.989</b>	<b>34,15%</b>	<b>45.306.852.011</b>	<b>65,85%</b>	<b>45.306.852.011</b>

**BAB VI****PENUTUP**

Berdasarkan Pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan Keuangan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

**1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan memperbandingkan anggaran yang diterimanya.

Realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada periode akhir Semester I ( 30 Juni 2023) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **23.499.147.989,00** atau **34.15%** dari pagu anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

**2. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain

mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini pengesahan/pembebanan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengguna Anggaran. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.